

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dalam menjawab rumusan masalah dari konflik di Xinjiang adalah faktor sejarah yang mengarah pada fakta bahwa ada perbedaan identitas mendasar antara Tiongkok dan penduduk asli Uighur di Xinjiang. Kedua, faktor ekonomi berupa disparitas ekonomi antara etnis Han dengan etnis Uighur. Ketiga, ada faktor politik, yaitu diskriminasi terkait ibadah dan lain-lain. Adanya ketidakpuasan, kemiskinan, kekerasan dan juga ketidakstabilan yang dialami oleh kaum Uighur, telah menciptakan kombinasi masalah yang kompleks dan kemudian menciptakan lingkungan yang kondusif bagi munculnya dan berkembangnya konflik Xinjiang.

Sikap keras pemerintah Tiongkok dalam menyelesaikan masalah di Xinjiang telah memperparah konflik di Xinjiang dan akhirnya muncul gerakan separatis Uighur. Pemerintah Tiongkok akhirnya bertindak lebih keras dan ada akhirnya terjadi konflik dan pertumpahan darah di Xinjiang. Beberapa kebijakan Tiongkok yang represif dan monokultural telah meningkatkan perbedaan dan kesenjangan antara identitas Uighur dan Han.

Perhatian utama Tiongkok adalah kedaulatan dan pemeliharaan integritas teritorial, jadi tentu saja Tiongkok tidak akan membiarkan wilayah mana pun dipisahkan dari Tiongkok. Sikap pemerintah yang sangat menentang separatisme di Xinjiang itu antara lain karena Xinjiang memiliki nilai yang sangat strategis dan ekonomis. Secara strategis, Xinjiang merupakan wilayah penyangga dari ancaman terorisme Asia Tengah dan secara ekonomi, Xinjiang memiliki potensi untuk pertanian, peternakan bahkan Xinjiang merupakan ladang minyak utama bagi pemerintah Tiongkok.

5.2 Saran

Diharapkan tindakan tegas diberlakukan terhadap pelaku pelanggaran hak asasi manusia terhadap Muslim di Uighur, sesuai dengan instrumen hak asasi manusia internasional, di mana penahanan sewenang-wenang dan penyiksaan sering dilakukan sedemikian rupa sehingga Muslim di Uighur dan warga negara menerima penuh hak dan perlakuan yang baik dari pemerintah negaranya sesuai dengan aturan-aturan hukum internasional yang berlaku.

PBB harus segera mengirimkan tim investigasinya untuk menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok terhadap Muslim di Uighur, seperti yang sebelumnya dilakukan di negara yang berkonflik. Masalah tersebut perlu diselesaikan oleh International Criminal Court agar penjahat tidak bisa semena-mena dalam memperlakukan warga, khususnya Muslim Uighur.

Hal terpenting yang harus diperhatikan ketika membuat konsesi (pemberian hak) Tiongkok adalah menghormati identitas Muslim Uighur tidak hanya dalam budaya tetapi juga dalam politik. Konsesi semacam itu dapat membuka jalan bagi otonomi yang lebih besar dengan membatasi kontrol negara atas pemerintah daerah. Dan selanjutnya, Tiongkok harus meningkatkan standar hidup orang-orang Uighur, mempromosikan nilai-nilai Islam dan menerapkan kebijakan preferensial. Tujuan jangka panjang Tiongkok bukan lagi untuk mengasimilasi Uighur, tetapi untuk membangun hubungan antar etnis yang setara, saling menghormati dan harmonis antara Han Tiongkok dan minoritas Uighur, orang-orang Uighur dan itu bisa menjadi tiket kemenangan bagi Tiongkok. Tiongkok dapat membunuh dua burung dengan satu batu, yaitu mencegah terorisme dan rangkul komunitas Uighur kembali.